



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 34.ATAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu dilakukan Penempatan tempat tugas berdasarkan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SiPil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam labatan Strukural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawa Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/I2O/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Kepala Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 280/HK.007/B2/2004 dan Nomor 34 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya kelepasan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keperasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016
2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BKD	
Kepala BKKBD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan pemeriksaan Keuangan Daerah di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Ternate
6. Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 34.A/KPTS/I/2016

TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR JABATAN PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2016

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
			2	3	4	5
1	YULINDA BALATJAI	19820524 201409 2 001	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo	6
2	NILAM SARI	19850713 201409 2 001	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo	7
3	SARNI HASAN	19690328 201409 2 001	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo	
4	SANTI NEBA	19731115 201409 2 001	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo	
5	NAJMA	19841124 201409 2 002	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo	
6	SANCE KAYELI	19790930 201409 2 002	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Sahu Timur	
7	RAFKEN FREKLES GUMLANG	19830811 201409 1 001	Pengatur Muda II/a	staf Kantor Camat Loloda	Penyuluhan KB pada Kec. Loloda	
8	NANI GAFUR	19781229 200604 2 007	Pengatur II/c	staf Kantor Camat Jailolo Selatan	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo Selatan	
9	CORINUUS TAPILATU	19650223 201409 1 001	Pengatur Muda II/a	staf pada BKKB-KS	Penyuluhan KB pada Kec. Ibu Selatan	
10	BAHARUDIN SARMOLE	19790524 200604 1 013	Pengatur II/c	staf Kantor Camat Jailolo Timur	Penyuluhan KB pada Kec. Jailolo Selatan	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid,Pemr.&Adm.Umum	
Kepala BKD	
Kepala BKKBD	
Kabag Hukum & Orgs.	